

Peran Pengembangan Ekonomi Umat Terhadap Penguatan Moderasi Beragama Dan Kepentingan Kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Abdul Kholid Azhari¹, Agung Setia², Marliyah³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Uinsu) Medan

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi Penulis: abdulkholidazhari@gmail.com¹, marliyah@uinsu.ac.id³

Abstract. *The Ministry of Religion in the program and target of ummah economic development activities adopts the vision of the Ministry of Religion in the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 18 of 2020 concerning the Ministry of Religion Strategic Plan for the 2020-2024 Period, which is prepared on the basis of the RPJMN 2020-2024 and is guided by the 2005-2025 RPJPN, Efforts to empower the Ummah Economy which aim to mobilize resources to empower the economic potential of the ummah in order to make the ummah prosperous through an increase in the level of productivity, it is hoped that resources which include humans and nature can be further improved in their management and development, so that it is hoped that the economic welfare of the ummah will be achieved which is one of the reinforcements of religious moderation relations to fellow human beings. The purpose of this study was to determine the role of human resources in completing official travel reports effectively and efficiently and what are the obstacles in carrying out official travel procedures. This research uses descriptive qualitative research, and uses primary data sourced from direct observation at the Regional Office of the Ministry of Religion of North Sumatra. The results in this study indicate that in answering the problems of official travel report files it is necessary to improve the work ability of employees or employees is an important element in order to achieve goals in the economic development of the people in the office of the Ministry of Religion of North Sumatra province.*

Keywords: *People's Economic Development, North Sumatra Religious Moderation, Performance.*

Abstrak. Kementerian agama dalam program dan sasaran kegiatan pengembangan ekonomi umat mengadopsi visi Kementerian Agama dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama Periode 2020-2024, yang disusun atas dasar RPJMN tahun 2020 -2024 dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025, Upaya pemberdayaan Ekonomi Ummat yang bertujuan untuk mengerahkan sumber daya guna memberdayakan potensi ekonomi umat dalam rangka mensejahterakan umat melalui kenaikan tingkat produktivitas maka diharapkan, sumber daya yang mencakup manusia dan alam dapat lebih di tingkatkan lagi pengelolaan dan pengembangannya, sehingga diharapkan tercapainya kesejahteraan ekonomi umat yang mana menjadi salah satu penguat relasi moderasi keagamaan terhadap sesama manusia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran sumber daya manusia dalam menyelesaikan laporan perjalanan dinas secara efektif dan efisien dan apa saja hambatan dalam melaksanakan prosedur perjalanan dinas. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dan menggunakan data primer yang bersumber dari observasi langsung di Kanwil Kemenag Sumatera Utara. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjawab permasalahan berkas laporan perjalanan dinas perlu dilakukan peningkatan kemampuan kerja karyawan atau pegawai merupakan unsur penting dalam rangka menjabai tujuan dalam pengembangan ekonomi umat di kantor kementerian agama provinsi sumatera utara.

Kata kunci: *Pengembangan Ekonomi Umat, Moderasi Beragama Sumatera Utara, Kinerja.*

PENDAHULUAN

Sehubungan visi “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”. Misi Kementerian Agama mengenai penguatan moderasi keagamaan juga mempererat kerukunan umat beragama. sejalan

Received: November 29, 2023; Accepted: Desember 15, 2023; Published: Maret 30, 2024

* Abdul Kholid Azhari Abdulkholidazhari@gmail.com

dengan sasaran tujuan presiden yaitu memajukan budaya persatuan sehingga, terciptanya kepribadian bangsa. Kebijakan peningkatan kualitas moderasi keagamaan dan kerukunan sesama umat beragama difokuskan pada penguatan pondasi bermoderasi guna meningkatkan kerukunan dan mengatasi konflik antar pemeluk agama di dalam dan di luar agama.

- a. Meningkatkan peran pembimbing, lembaga, organisasi sosial, figure panutan agama di masyarakat dan lembaga pelatihan inklusi dan sosialisasi nilai-nilai agama yang moderat, substansi, inklusi, serta toleransi.
- b. Pengorganisasian pengetahuan agama secara berimbang sehingga sesuai dengan kepribadian budaya lokal, yang nantinya dapat disimpan dalam bentuk elektronik di clearing house sehingga memudahkan untuk dijangkau sistem.
- c. Kajian pustaka dan melakukan pengembangan dan observasi di bidang moderasi keagamaan.
- d. Konsolidasi isi moderasi keagamaan dalam mata pelajaran agama, adab, akhlak, dan moral pada jenjang dan jenis pendidikan.
- e. Meningkatkan aktivitas pendidikan ekstrakurikuler agama dengan partisipasi murid dan guru, di semua agama/daerah/negara.
- f. Peningkatan kualitas perilaku toleransi dan dan perilaku etis di antara siswa, pendidik, dan staf pendidikan lainnya.
- g. Membentuk teamwork untuk menyusun rancangan ide, kebijakan, strategi dalam penerapan, dan mendokumentasikan tinjauan isi dari moderasi keagamaan.
- h. Meningkatkan kuantitas guru agama/penyiar agama dalam bidang pendidikan dan memberikan contoh realisasi moderasi keagamaan.
- i. Penguatan fungsi Poidstren dalam pengembangan moderasi agama.
- j. Meningkatkan fungsi tempat ibadah menjadi pusat moderasi keagamaan.
- k. Meningkatkan mutu dan keseringan sosialisasi pendidikan moderasi di lembaga keagamaan dan media sosial maupun massa.
- l. Meningkatkan tingkat keseringan perhimpunan diskusi dan percakapan antar pemuka agama tentang implementasi moderasi antar agama.
- m. Meningkatkan tingkat keseringan diskusi tentang kerukunan antar umat beragama dalamantisipasi dan penanganan masalah keagamaan.
- n. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang apa yang menjadi pemicu dan berakibat masalah yang dihasilkan dari keyakinan agama.

Dalam menangani persoalan-persoalan serta konflik beragama yang dapat memicu perpecahan persatuan Indonesia, diperlukan sesuatu, kelompok, atau barisan orang-orang yang bersedia

menguatkan kerukunan sesama umat beragama. Maka FKUB hadir sebagai jembatan, FKUB merupakan wadah yang sengaja dibentuk untuk memenuhi segala harapan untuk kepentingan agama dan kerukunan umat beragama.

Upaya penguatan moderasi beragama terus dilakukan di KanWil Kementerian Agama Sumatera Utara. Secara spesifik salah satunya melalui Program Bina Ekonomi Masyarakat dan Sumberdaya Keagamaan. Pembangunan ekonomi umat dilakukan untuk mengembangkan perekonomian umat sendiri untuk kepentingan umat atau untuk meningkatkan kapasitas masyarakat secara luas dengan mengembangkan dan meningkatkan potensinya melalui pembangunan ekonomi. Ekonomi Umat adalah masalah besar yang harus dilalui umat saat ini. Membahas ekonomi umat berarti berarti membicarakan masalah ekonomi, yaitu semua kegiatan yang terlibat dalam produksi barang atau jasa untuk persediaan atau distribusi kepada konsumen atau antara orang-orang secara bersama-sama di pasar. Pengembangan ekonomi lokal adalah proses yang melibatkan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat untuk mendorong, merangsang, dan mempertahankan bisnis yang menciptakan lapangan kerja.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu instansi pemerintah yang bekerja mengurus persoalan berbasis keagamaan diwilayah Provinsi Sumatera Utara.(Aini dan Sudiarti 2022) Kemenag Provsu merupakan instansi yang meneruskan amanat kerja dari Kemenag pusat untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Untuk itu dalam memenuhi target kerja dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk publik maka dibutuhkan karyawan dengan kompetensi yang baik, kemampuan serta keterampilan yang mumpuni, semangat kerja yang tinggi, disiplin, dan taat terhadap peraturan. Untuk mencapai kinerja yang terbaik pegawai harus memiliki sikap disiplin dan produktivitas kerja yang tinggi. Kenyataannya dilapangan ditemukan seringkali pegawai mengabaikan kedisiplinan. Hal ini terlihat dari adanya pegawai yang bersikap sepele hingga terlambat masuk kerja, tidak mengikuti kegiatan apel dan hal-hal yang menyangkut kedisiplinan lainnya. Produktivitas kerja di Kantor Kemenag juga menjadi perhatian. Oleh sebab itu penelitian terkait dengan implementasi kedisiplinan serta produktivitas kerja ini penting dilakukan terlebih lagi terhadap instansi pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan terhadap publik terlebih lagi menyangkut urusan keagamaan. Maka dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian pihak yang terkait dalam rangka peningkatan kinerja pegawai.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini tentunya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif (Adlini et al. 2022), dan menggunakan data primer yang bersumber dari observasi langsung di Kanwil Kemenag Sumatera Utara. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjawab permasalahan berkas laporan perjalanan dinas perlu dilakukan peningkatan kemampuan kerja karyawan atau pegawai merupakan unsur penting dalam rangka menggapai tujuan dalam pengembangan ekonomi umat di kantor kementerian agama provinsi Sumatera Utara. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran sumber daya manusia dalam menyelesaikan laporan perjalanan dinas secara efektif dan efisien dan apa saja hambatan dalam melaksanakan prosedur perjalanan dinas.

Serta upaya pemberdayaan Ekonomi Ummat yang bertujuan untuk mengerahkan sumber daya guna memberdayakan potensi ekonomi umat dalam rangka mensejahterakan umat melalui kenaikan tingkat produktivitas maka diharapkan, sumber daya yang mencakup manusia dan alam dapat lebih ditingkatkan lagi pengelolaannya dan pengembangannya, sehingga diharapkan tercapainya kesejahteraan ekonomi ummat yang mana menjadi salah satu penguat relasi moderasi keagamaan terhadap sesama manusia.

Dalam penelitian kali ini juga menerangkan bahwa implementasi dari disiplin kerja yang mencakup indikator kehadiran, ketaatan pada peraturan dan standar kerja, serta tingkat kewaspadaan yang tinggi dan kemudian produktivitas kerja dengan indikator kemampuan, hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu dan efisiensi telah diterapkan seluruhnya oleh pegawai dengan tingkat penilaian yang baik hingga cukup baik dalam pelaksanaannya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penguatan Ekonomi Umat

Kuatnya ekonomi masyarakat merupakan kondisi yang diharapkan, yang mana titik beratnya adalah tercapainya kesejahteraan manusia. Aspek ekonomi ini sangat penting, bahkan dalam *usul al fiqh* ia termasuk salah satu dari lima aspek yang dilindungi, yang terkenal dengan *al-umur al-daruriyah li al-nas* yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal ini sejalan dengan tujuan syari'ah yaitu hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan, rahmat, kebahagiaan dan kebijaksanaan. Tindakan apapun yang bertentangan dengan keadilan, dan merubah rahmat menjadi kesulitan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan dan hikmah menjadi kebodohan, maka semua itu tidaklah berhubungan dengan syari'ah Islam.

Memang dalam al-Qur'an terdapat term kelas penindas (Mustakbirin) dan kelas tertindas (Mustad'afin) yang terdapat konflik di antara mereka, namun ini bukan dalam arti Islam melegalkan konflik sosial. Dalam hal ini agama Islam memberikan tata aturan bagi masing-masing kelas tersebut, yang berupa kewajiban dan hak masing-masing. Dengan kata lain, mereka yang hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut tidak boleh berlepas tangan, karena mereka punya tanggung jawab masing-masing. Perilaku manusia yang bisa mengakibatkan ketidakberdayaan di bidang ekonomi sangat bertentangan dengan semangat kerja yang dianjurkan oleh Islam.

Islam menganjurkan agar manusia memanfaatkan potensi dirinya (Sumber Daya Manusia) dan potensi alam (Sumber Daya Alam) dalam bekerja. Pemanfaatan potensi diri semaksimal mungkin dalam bekerja akan membawa kepada keberdayaan ekonomi manusia sehingga mereka menjadi kelompok yang kuat (berdaya), kelompok yang disukai oleh Allah.

Oleh karena itu, Sebagai khalifah Allah di muka bumi, manusia berkewajiban membangun dunia dan memanfaatkan sumber daya alamnya dengan cara yang baik dan adil. Dengan demikian, manusia secara individual bertanggung jawab memanfaatkan tenaganya untuk bekerja dalam rangka memakmurkan bumi dan mengupayakan pemenuhan kebutuhan pokoknya. Secara otomatis bila kesadaran semacam ini diaplikasikan dalam bentuk kerja, akan membawa dampak positif dan berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan hidup dalam rangka memperdayakan diri di bidang ekonomi.

Di samping itu, manusia merupakan agen dan objek dari pembangunan. Pernyataan ini mempunyai konsekuensi bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan ekonomi. Hal ini mengingat bahwa manusia adalah penggerak dalam pembangunan yang mengantisipasi masalah, membuat perencanaan, mempertimbangkan sistem nilai agama dan masyarakat, menggali sumber alam, mengakumulasi dana, membangun organisasi sosial, ekonomi dan politik serta meletakkan semuanya dalam satu wadah pembangunan.

Dalam usaha penguatan ekonomi umat ini, tentunya yang pertama kali dilihat adalah bagaimana penguatan ekonomi dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu keluarga. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : "Dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, maka hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan

perkataan yang benar”. Bentuk dari penguatan ekonomi umat ini bisa dilakukan dengan pengembangan kewirausahaan yang dilakukan oleh sebuah keluarga, sehingga akan tercipta suatu bentuk kemandirian usaha ekonomi produktif. Pada akhirnya akan terwujud suatu keluarga yang lebih dan semakin sejahtera serta mandiri. Di antara indikasi dari keluarga sejahtera ini adalah adanya kemampuan fungsional keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga mampu memberi kontribusi terhadap kebutuhan kehidupan masyarakat. Akan tetapi, pengembangan kewirausahaan keluarga tersebut tentunya membutuhkan suatu jaminan struktural, dalam hal ini pemerintah, dan lembaga keagamaan yang mempunyai kekuatan moral, untuk mendorong dan memperlancar usaha tersebut. Kegiatan ekonomi produktif khususnya yang dilakukan masyarakat bawah tanpa jaminan struktural, bisa diibaratkan melepas anak kecil di tengah-tengah lalu lintas ibu kota. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dan lembaga keagamaan dalam pengembangan usaha produktif tersebut. Kebijakan yang demikianpun masih memerlukan suatu kebijakan perlindungan ekonomi yang tidak hanya diperlukan oleh perusahaan besar ekonomi modern, tetapi justru merupakan suatu hal yang sangat penting dan fungsional bagi masyarakat bawah.

a. Peran Lembaga Keagamaan

Lembaga keagamaan, yang mempunyai kekuatan moral dan mendapatkan legalisasi dari umat, mempunyai peranan penting dalam penguatan ekonomi. Hal ini disebabkan karena agama sendiri mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral, dan etika dalam pembangunan nasional. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, keluarga, masyarakat, serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga agama sering dicirikan sebagai pemersatu aspirasi manusia yang paling sublime; sebagai sumber moralitas, sumber tatanan masyarakat dan perdamaian batin individu; sebagai sesuatu yang memuliakan dan yang membuat manusia beradab. Untuk itu, pembangunan agama perlu mendapat perhatian lebih besar, baik yang berkaitan dengan penghayatan dan pengamalan agama, pembinaan pendidikan agama, maupun pelayanan kehidupan beragama, termasuk pemberdayaan lembaga keagamaan dalam rangka menguatkan ekonomi umat (Ekonomi, Melalui, dan Keagamaan 2011).

Dalam prakteknya di masyarakat, lembaga keagamaan biasanya menyangkut hal yang mengandung arti penting tertentu, yaitu menyangkut masalah aspek kehidupan manusia, yang dalam transendensinya, mencakup sesuatu yang mempunyai arti penting dan menonjol bagi manusia. Bahkan sejarah menunjukkan bahwa lembaga-lembaga keagamaan merupakan bentuk asosiasi manusia yang paling mungkin untuk terus bertahan. Di samping itu, secara personal, lembaga keagamaan terdiri dari para ulama yang sejarah juga telah membuktikan

bahwa mereka bukan hanya sebagai sosok orang yang berilmu, tetapi juga sebagai penggerak dan motivator masyarakat. Kualitas keilmuan para ulama telah mendorong mereka untuk selalu aktif membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk masalah perekonomian umat.

b. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah, (Muhammad 2022) sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam 1) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan, 2) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, 3) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Ekonomi menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan umat, maju mundurnya sebuah bangsa di samping karena maju dan tingginya moral dan peradaban, juga sangat tergantung pada kemajuan segi ekonomi. Ada beberapa hal yang sangat penting diperhatikan dalam upaya pembangunan ekonomi umat di antaranya :

a) Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam adalah satu-satunya sistem yang mampu mendongkrak dan mendorong umat dari keterbelakangan dan keterpurukan ekonomi menuju kejayaan dan kegemilangan ekonomi yang berlandaskan aqidah dan moral yang tinggi. Bahkan beberapa cendekiawan Eropa mengakui bahwa sistem ekonomi barat sejalan dengan kesadaran berfikir dunia Islam.

b) Membangun Semangat Wirausaha

Untuk membangun ekonomi umat hal yang pertama yang harus dibangun adalah sifat kewirausahaan, yaitu ketekunan, kesungguhan dan kesabaran dalam menjalani sebuah usaha walau sekecil apapun usahanya, hal ini cukup penting untuk ditanamkan, karena sebanyak apapun modal yang diberikan tanpa semangat wirausaha yang baik, maka modal itu akan hilang dengan percuma dan tidak dapat dimanfaatkan, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kita agar selalu bekerja dan menjadi usahawan.

c) Persatuan Umat

Persatuan dan kesatuan tidak hanya dibutuhkan dalam mempertahankan nilai-nilai aqidah, dalam berbisnis pun sangat dibutuhkan jiwa kebersamaan, yang dalam bisnis sering disebut dengan jaringan/Net Work, membangun jaringan juga menjadi hal yang penting maka usaha apapun akan mengalami stagnasi. Hal itu dapat kita lihat pada bisnis elektronik di Indonesia

yang dikuasai oleh orang China, yang sering dikeluhkan oleh orang-orang pribumi karena sulit bersaing dengan mereka, karena mereka memiliki jaringan yang kuat, hal senada tentang pentingnya membangun jaringan dalam membangun usaha dan perekonomian umat.

d) Kebijakan pemerintah

Untuk memperlancar proses perbaikan ekonomi umat, secara mutlak dibutuhkan kebijakan pemerintah, karena hanya pemerintahlah yang mempunyai kemampuan dan kekuatan dari segi politis dan ekonomis untuk mendorong dan membuat kebijakan dan aturan-aturan yang sesuai dengan syari'at Allah, Demikianlah apa yang telah tercatat dalam sejarah dimasa kejayaan Islam terdahulu.

e) Penyadaran Zakat dan Pengelolaannya

Salah satu unsur penting juga dalam hal pembangunan ekonomi umat adalah adanya kesadaran bersama tentang kewajiban mengeluarkan zakat, kewajiban mengeluarkan zakat tidak hanya terbatas pada binatang ternak, emas dan perak, barang perniagaan, barang tambang dan rikaz, serta hasil pertanian. Seperti apa yang telah ditetapkan oleh imam-al-mazahib dalam kitab Fiqh al-mazahib alArba'ah yang secara defakto hari ini penghasilannya sangat terbatas, tapi juga dibidang profesi, industri dan teknologi, yang penghasilannya jauh berlipat-lipat dari penghsilan pertanian dan perternakan.

• Proses pemberdayaan masyarakat terdiri dari lima tahap :

- 1) Menghadirkan kembali pengalaman yang dapat memberdaya guna dan tidak memberdayakan.
- 2) Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan tidak memberdayakan.
- 3) Mengidentifikasi masalah.
- 4) Mengidentifikasi basis daya yang bermakna.
- 5) Mengembangkan rencana-rencana aksi dan pengimplementasian.

B. Pengembangan Ekonomi Umat Terhadap Penguatan Moderasi Beragama

Ginandjar Kartasasmita (1996:249) memaparkan bahwa, pemberdayaan dalam upaya pengembangan ekonomi Umat adalah Upaya pemberdayaan Ekonomi Ummat yang bertujuan untuk mengerahkan sumber daya guna memberdayakan potensi ekonomi umat dalam rangka mensejahterakan umat melalui kenaikan tingkat produktivitas maka diharapkan, sumber daya yang mencakup manusia dan alam dapat lebih di tingkatkan lagi pengelolaan dan pengembangannya, sehingga diharapkan tercapainya kesejahteraan ekonomi ummat yang mana menjadi salah satu penguat relasi moderasi keagamaan terhdap sesama manusia.

Dalam mengembangkan Ekonomi Ummat dalam Upaya Penguatan Moderasi Beragama yang dilakukan oleh Kanwil Kementrian Agama Provinsi Sumatera Utara dapat di wujudkan melalui

program kegiatan yang telah disusun dalam Sasaran Kegiatan dalam Renstra Tahun 2020-2024 yang diantaranya adalah :

1. Meningkatkan konservasi dan optimalisasi produk budaya dan religi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Jumlah produk budaya religi yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat (wisata religi, tempat, artefak)

2. Meningkatnya rasa hormat terhadap keragaman budaya, sebagai wujud implementasi nilai-nilai agama.

Peningkatan Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang memuat nilai-nilai religi (misalnya MTQ Pesparawi, STQ, Ustawa, dll)

3. Peningkatan pembangunan sosial untuk mendukung pelayanan keagamaan yang lebih baik lagi

1) Jumlah media/alat dan infrastruktur ibadah yang dipersiapkan.

2) Jumlah kitab keagamaan dan kitab-kitab suci yang dipersiapkan.

3) Rasio media beribadah yang difasilitasi.

4) Jumlah panduan layanan syariah yang dipersiapkan.

5) Jumlah masjid/mushalla yang dilengkapi dengan pengukuran penunjuk arah kiblat.

6) Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina dan di berdayakan.

7) Jumlah center observation Bulan yang sesuai standar.

4. Meningkatnya manajemen dan pembinaan pemberdayaan dana zakat

1) rasio amal yang diberdayakan.

2) rasio lembaga zakat yang diberdayakan.

5. Peningkatan manajemen aset wakaf

1) Rasio lembaga wakaf yang dibina.

2) Rasio akta ikrar wakaf yang diterbitkan.

3) Rasio tanah wakaf yang bersertifikat

6. Peningkatan pemberian sumbangsih pendidikan bagi anak yang berasal dari keluarga dan lingkungan tidak berada, daerah afirmasi, dan berbakat

1) Jumlah siswa penerima BOS pada siswa Madrasah.

2) Jumlah siswa penerima BOS pada siswa Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah.

3) Rasio siswa penerima PIP pada siswa Madrasah/sekolah keagamaan.

4) Rasio siswa penerima PIP pada siswa Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;

Upaya pencapaian tujuan, sasaran, dan program serta kegiatan Kanwil Departemen

Ibadah dinilai membutuhkan dukungan berbagai sumber daya, khususnya bantuan dana penuh..

modal dana diberikan oleh pemerintah, pemerintah pusat dan daerah serta dari masyarakat. Dana saat ini berasal dari Rupiah Murni dan berbagai macam sumber dana lainnya. Susunan pendanaan yang di sebutkan Renstra Kanwil Kementerian Agama 2020-2024 akan menjadi tumpuan dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan guna mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan Kanwil Departemen Ibadah berdasarkan Renstra, serta berlandaskan aturan yang disetujui dalam sistem pengelolaan hibah nasional.

Melalui Program dan Sasaran kegiatan yang telah disusun oleh Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara yang termaktub dalam Renstra Kanwil tahun 2020-2024(Cantika dan Akmal Tarigan 2022)dapat dilihat daya dan upaya dalam mengembangkan ekonomi umat terhadap penguatan moderasi beragama, beserta anggaran pendanaan yang telah di rencanakan. Dengan semakin tingginya tingkat bermoderasi serta rukunnya sesama masyarakat maka diharapkan dapat Menurunkan problematika isi-isu kerukunan yang memecah belah umat, Meningkatkan frekuensi penuntasan konflik internal agama melalui penguatan moderasi keagamaan, Meningkatkan taraf mengedepankan moderasi keagamaan, Memperkuat bidang pendidikan berwawasan luas dan bermuatan moderat.

a. Model dan Upaya Moderasi Agama

Penguatan moderasi beragama menjadi salah satu indikator utama sebagai upaya membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Moderasi beragama juga menjadi salah satu prioritas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Kementrian Agama(Faisal et al. 2022).Dengan adanya moderasi agama, seseorang tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Moderasi agama merupakan usaha kreatif untuk mengembangkan suatu sikap keberagaman ditengah berbagai desakan ketegangan (constrains), seperti klaim kebenaran absolut dan subjektivitas, antara interpretasi literal dan penolakan yang arogan atas ajaran agama, dan antara radikalisme dan sekularisme.

Indonesia menguraikan tentang tiga prinsip moderasi (wasathiyah) yaitu; Pertama, moderasi pemikiran, yaitu pemikiran dalam keagamaan yakni dikenali dengan kemampuan mensistesisikan antara teks dan konteks, sebagai contoh dalam pembacaan kitab suci dan memadukan keduanya secara dinamis agar mendapatkan pemahaman yang kompleks. Kedua, moderasi dalam gerakan yaitu menyebarkan dakwah yang bertujuan mengajak kebaikan dan menjauhi segala kemungkaran.

Gerakan ini sangat menghindari kekerasan dan sikap memaksa, tapi dengan sikap lemah lembut dan santun. Ketiga, moderasi dalam perbuatan (praktik keagamaan), ialah penguatan hubungan agama dan kebudayaan (tradisi) masyarakat setempat. Ide dasar dalam moderasi ialah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Ada setidaknya 3 alasan

utama mengapa kita perlu moderasi dalam beragama. Pertama, salah satu esensi kehadiran agama ialah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, termasuk dalam menjaga untuk tidak menghilangkan nyawa. Moderasi agama menjunjung tinggi kemanusiaan, dan pentingnya moderasi beragama adalah karena ia menjadi sebuah cara dalam mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya. Kedua, seiring dengan perkembangan umat manusia, agama juga turut berkembang. Teks-teks agama juga mengalami multitafsir, sehingga ada orang-orang yang bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya dan sesuai dengan kepentingan politiknya. Ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi bergama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat-istiadat lokal agar terjalin dengan rukun dan damai.

b. Prinsip Dasar Moderasi: Adil dan Berimbang

Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal, misalnya : keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan.

Begitulah, inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan di atas. Dalam KBBI, kata “adil” diartikan: 1) tidak berat sebelah/tidak memihak; 2) berpihak kepada kebenaran; dan 3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. Kata “wasit” yang merujuk pada seseorang yang memimpin sebuah pertandingan, dapat di maknai dalam pengertian ini, yakni seseorang yang tidak berat sebelah, melainkan lebih berpihak pada kebenaran.

Prinsip yang kedua, keseimbangan, adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka yang punya sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak kepada keadilan, hanya saja keberpihakannya itu tidak sampai merampas hak orang lain sehingga merugikan. Keseimbangan dapat dianggap sebagai satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal. Moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam, tapi juga agama lain. Lebih jauh, moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga dan masyarakat hingga hubungan antarmanusia yang lebih luas.

Kedua nilai ini, adil dan berimbang, akan lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki tiga karakter utama dalam dirinya: kebijaksanaan (wisdom), ketulusan (purity), dan keberanian (courage). Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama, selalu memilih jalan tengah, akan lebih mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki ke luasan pengetahuan agama yang memadai sehingga dapat bersikap bijak, tahan godaan sehingga bisa bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri sehingga berani mengakui tafsir kebenaran orang lain, dan berani menyampaikan pandangannya yang berdasar ilmu.

Moderasi beragama meniscayakan umat beragama untuk tidak mengurung diri, tidak eksklusif (tertutup), melainkan inklusif (terbuka), melebur, beradaptasi, bergaul dengan berbagai komunitas, serta selalu belajar di samping memberi pelajaran. Dengan demikian, moderasi beragama akan mendorong masing-masing umat beragama untuk tidak bersifat ekstrem dan berlebihan dalam menyikapi ke ragaman, termasuk keragaman agama dan tafsir agama, melainkan selalu bersikap adil dan berimbang sehingga dapat hidup dalam sebuah kesepakatan bersama.

Dalam konteks bernegara, prinsip moderasi (Apriani dan Aryani 2022) ini pula yang pada masa awal kemerdekaan dapat mempersatukan tokoh kemerdekaan yang memiliki ragam isi kepala, ragam kepentingan politik, serta ragam agama dan kepercayaan. Semuanya bergerak ke tengah mencari titik temu untuk bersama-sama menerima bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai kesepakatan bersama. Kerelaan dalam menerima NKRI sebagai bentuk final dalam bernegara dapat dikategorikan sebagai sikap toleran untuk menerima konsep negara-bangsa.

c. Peran Kementrian Agama Dalam Moderasi Beragama

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai simpul utama dan kata kunci terwujudnya bangunan sosial keberagaman masyarakat Indonesia, kerukunan umat beragama terus diperkuat oleh Kementerian Agama melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog, peningkatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pembentukan desa sadar kerukunan, kerja sama nasional dan internasional (Sinaga et al. 2022). Untuk memotret realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan, digunakan Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks KUB), yang mencakup tiga dimensi, yaitu :

- 1) Toleransi.
- 2) Kesetaraan, dan
- 3) Kerja sama.

Dalam pengukuran Indeks KUB juga diperhitungkan variabel- variabel pendidikan, pendapatan, partisipasi sosial, pengetahuan terhadap peraturan, rural-urban (wawasan kemajemukan) dan daerah mereka tinggal. Kementerian Agama telah berupaya mempraktikkan sejumlah strategi, pendekatan, dan kegiatan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama melalui kemitraan dengan seluruh aktoraktor kerukunan yang merupakan semua komponen masyarakat yang di antaranya terdiri atas pimpinan majelis-majelis agama, pimpinan ormas-ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar, penyuluh agama, pengawas, dosen, guru agama, dan insan jurnalis. Disebut, aktor⁶, karena diharapkan tokoh-tokoh tersebut dapat memberikan pengaruhnya kepada masyarakat atas apa-apa yang telah disampaikan dalam kegiatan dialog, workshop, dan seminar terkait kerukunan.

Kompetensi dalam Kerukunan Umat Beragama Kompetensi aktor dalam kerukunan umat beragama ditingkatkan melalui berbagai kegiatan seperti :

- 1) Pendalaman pemahaman terhadap regulasi moderasi dan kerukunan umat beragama.
- 2) Peningkatan kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan konflik.
- 3) Pelatihan promosi kerukunan umat beragama, dan penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai.

Pelibatan tokoh perempuan dan unsur pemuda tidak hanya dilakukan pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan, juga pada setiap struktur kelembagaan yang terkait kerukunan umat beragama. Penguatan kompetensi aktor-aktor kerukunan merupakan modal dalam membingkai kerukunan antarumat beragama guna mewujudkan masyarakat yang aman, damai, sejahtera, dan bersatu.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian. Tujuan pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama. Terkait hal tersebut, berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.

Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong⁷ Terdapat 6 (enam) kata kunci didalam Visi

Kementerian Agama, yaitu: Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul. Makna dalam masing-masing kata kunci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Profesional, artinya adalah memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus.
2. Andal, artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas.
3. Saleh, artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah.
4. Moderat, artinya selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.
5. Cerdas, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran; dan Unggul, artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) dari pada yang lain- lain.

Berdasarkan keenam kata kunci tersebut, maka yang dimaksud dengan Kementerian Agama yang profesional dan andal adalah Kementerian Agama didukung oleh ASN yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus serta dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas di bidang agama dan pendidikan. Yang dimaksud “dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul” adalah produk yang berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran, serta lebih pandai dan cakap.

C. Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil riset serta tanya jawab mengenai analisa kemampuan Aparatur Sipil Negeri pada aspek pendidikan(Damanik 2022) perguruan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, hingga kemampuan ASN pada aspek pendidikan perguruan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara bisa diukur selaku berikut :

1. Kesesuaian Jam Kerja

Kedatangan serta kembali tepat waktu jadi kunci untuk kesuksesan target kemampuan yang sudah ditandatangani. Karyawan berupaya buat hadir sesuai jam kegiatan yang telah diresmikan. Perihal ini merupakan bentuk konsekuensi karyawan selaku ASN yang harus tiba pas waktu. Tetapi profesi yang menumpuk dampak minimnya alat serta karyawan yang terdapat, terdesak jam kepulangan ditunda buat melaksanakan kewajiban di luar jam kegiatan

baik itu di hari kegiatan ataupun memakai perhitungan lewat waktu diluar jam kegiatan ataupun hari libur, tujuannya merupakan supaya seluruh profesi bisa berakhir serta bisa tingkatkan daya produksi karyawan.

2. Tingkatan Kehadiran

Bersumber pada hasil tanya jawab, bisa dipaparkan kalau karyawan berupaya senantiasa aktif masuk kegiatan perihal ini membuktikan kalau tiap karyawan telah taat kepada ketentuan patuh karyawan sebab ini bisa mengukur kinerjanya dalam bertugas. Karyawan berupaya penuh kedatangan serta senantiasa mengusahakan buat muncul kegiatan. Aktivitas masuk kantor telah jadi keharusan semua pegawai(harus) sebab perihal itu selaku wujud komitmen kepada lembaga. Buat memperoleh kemampuan yang maksimum semua ASN kantor wilayah Kementerian Agama provinsi Sumatera Utara sudah menjajaki determinasi jam kegiatan yang legal serta nyaris ditentukan tidak terdapat karyawan yang tidak masuk kegiatan tanpa penjelasan, ini hendak jadi bagian berarti dalam cara penilaian arahan dengan cara periodik dalam menata serta melakukan pemograman program organisasi atau instansi. Kedatangan karyawan jadi penanda berarti dalam bertugas, bobot kegiatan telah dibagi habis di antara karyawan tetapi bila terdapat yang berhalangan muncul disebabkan sakit, menjajaki rapat-rapat ataupun kewajiban luar kota pasti hendak pengaruhi kemampuan karyawan, perihal inilah terpaut dengan kedatangan karyawan jadi penanda berhasil ataupun tidaknya kemampuan karyawan.

3. Kerjasama Dampingi Pegawai

Hasil riset membuktikan sudah terbentuknya kerjasama antara karyawan dalam menuntaskan kewajiban kegiatan. Semacam yang dicoba oleh arahan yang senantiasa melaksanakan kegiatan serupa dengan karyawan lain buat menuntaskan kewajiban. Umumnya bila terdapat kewajiban terkini hingga arahan langsung memanggil karyawan yang terpaut buat menuntaskan kewajiban terkini itu. Arahan senantiasa berbicara dengan aparat itu mengenai kewajiban apakah telah berakhir apa belum. Tetapi sedang ada hambatan, semacam karyawan sedang banyak profesi yang wajib teratasi alhasil profesi ataupun kewajiban terkini itu tertunda sebagian hari. Tetapi arahan senantiasa hendak memohon buat dituntaskan dengan lekas profesinya. Kerjasama dalam badan jadi amat berarti sebab kemampuan ialah perwujudan dari kegiatan personil serta regu.

Karyawan mempunyai komitmen yang besar supaya tiap terdapat kewajiban terkini hingga langsung berkoordinasi dengan karyawan yang lain buat bertugas serupa menuntaskan kewajiban itu serta tidak ditunda. Itu telah jadi himbauan dari pimpinan buat senantiasa melaksanakan kerjasama dengan regu dalam menuntaskan kewajiban. Permasalahannya

merupakan tiap karyawan wajib memilah durasi buat melaksanakan profesi bersama- sama sebabkaryawan mempunyai kewajiban sendiri- sendiri yang wajib pula teratasi pas durasi.

Aparatur awam negeri di Departemen Agama provinsi Sumatera Utara bertugas cocok dengan kontrak kegiatan yang ditandatangani. Dalam bertugas, mereka berdasar pada kewajiban serta guna tiap- tiap. Penerapan kontrak kegiatan dilaksanakan dengan suka batin oleh karyawan meski sedang terdapat sebagian profesi yang tidak cocok dengan kewajiban serta fungsinya.

a. Pengaruh integritas terhadap kinerja pegawai

Pegawai yang berintegritas juga cenderung lebih positif dalam hal kepuasan kerja karena tidak perlu khawatir terkena kebohongan dan penipuan dalam kehidupan kerja sehari-hari, hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (Simatupang et al. 2023). Sejalan dengan penelitian bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan integritas terhadap kinerja pegawai. Orang yang berintegritas adalah orang yang amanah, dapat dipercaya, dan patut ditiru. Walaupun pendapat berbeda ditemukan dalam

penelitian bahwa integritas tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Penyebabnya dalam pekerjaan yang sangat teknis dan tidak sering melibatkan keputusan moral atau etika, integritas mungkin bukan penentu utama kinerja pekerjaan.

Jika integritas diukur secara tidak tepat atau kinerja dinilai secara objektif, hubungan antara keduanya mungkin tidak dapat ditunjukkan dengan jelas, padahal Integritas mengharuskan individu untuk mematuhi standar teknis dan etika suatu organisasi atau bisnis. Penting untuk diingat bahwa integritas tetap menjadi nilai penting di banyak organisasi karena dapat memengaruhi budaya dan reputasi perusahaan, meskipun hal tersebut tidak selalu diungkapkan secara langsung dalam kinerja individu. Oleh karena itu, dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia, integritas selalu menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam memotivasi dan mengelola kinerja pegawai.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai

Kinerja yang dicapai pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup organisasi. Dalam mencapai kinerja pegawai yang tinggi ada beberapa faktor yang mempengaruhi menjadi pemicu apakah kinerja pegawai tinggi atau rendahnya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu (Indra Sakti Nasution et al. 2021) :

1. Faktor kemampuan Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya. Pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata dengan Pendidikan yang memadai untuk jabatan dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Maka ia akan lebih mudah mencapai prestasi yang diharapkan. Pekerjaan sehari-hari. Maka ia akan lebih mudah mencapai prestasi yang diharapkan. Oleh sebab itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

2. Faktor individu Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seseorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi mengerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).

c. Tunjangan Kinerja dan Kecurangan Pegawai(Qodari, Fachruzzaman, dan Coryanata 2021) :

Dalam teori Fraud Triangle Theory, kecurangan terjadi karena adanya tekanan (pressure) untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tunjangan kinerja dimaksudkan sebagai faktor pendorong untuk membantu memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan jenjang yang dibutuhkannya. Diharapkan efek pemberian tunjangan kinerja pegawai berdampak terhadap perubahan cara pandang dan proses kerja sehingga pegawai semakin disiplin, banyak ide, kreatif dan mau bekerja lebih giat lagi.

Tunjangan kinerja merupakan imbalan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan grading atau posisi jabatan dan kinerja yang dihasilkan. Pemberian tunjangan kinerja sangat penting bagi pegawai guna merangsang seseorang untuk melakukan pekerjaan melebihi apa yang diinginkan oleh organisasi. Disamping itu pemberian tunjangan kinerja juga berfungsi sebagai penghargaan dari pegawai yang telah melakukan suatu pekerjaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan.

Martaningtyas (2014) menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara tunjangan kinerja dengan kecurangan pegawai sesuai rekomendasi World Bank (1997) tentang strategi untuk pemberantasan korupsi secara komprehensif. Salah satu komponen penting adalah membangun birokrasi yang berdasarkan ketentuan hukum dengan struktur penggajian yang menghargai kejujuran para pegawai negeri. Hal ini juga diterapkan di Swedia dan berhasil mengurangi tingkat korupsi. Indonesia juga telah menerapkan dengan memberikan tunjangan kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, semakin besar tunjangan kinerja yang diterima pegawai maka tingkat kecurangan pegawai juga akan menurun. Disamping pemberian tunjangan kinerja, pegawai diberikan pelatihan secara bergiliran mengenai screening atau revolusi mental, sehingga diharapkan kecurangan yang akan terjadi dapat ditekan. Pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai adalah bentuk apresiasi terhadap prestasi, bagi pegawai yang

kinerjanya baik, tentu perlu diberikan apresiasi sesuai dengan capaian dan beban kerja pegawai.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan kami sebagai penulis dan pengalaman kami selama kegiatan magang yang berada langsung di Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara ini menunjukkan bahwa dalam menjawab permasalahan berkas laporan perjalanan dinas perlu dilakukan peningkatan kemampuan kerja karyawan atau pegawai merupakan unsur penting dalam rangka menggapai tujuan dalam pengembangan ekonomi umat di kantor kementerian agama provinsi sumatera utara. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran sumber daya manusia dalam menyelesaikan laporan perjalan dinas secara efektif dan efesiensi dan apa saja hambatan dalam melaksanakan prosedur perjalanan dinas.

- Dalam hal tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu :
 1. Faktor kemampuan Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya. Pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata dengan Pendidikan yang memadai untuk jabatan dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Maka ia akan lebih mudah mencapai prestasi yang diharapkan. Pekerjaan sehari-hari. Maka ia akan lebih mudah mencapai prestasi yang diharapkan. Oleh sebab itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
 2. Faktor individu Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seseorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi mengerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).

B. SARAN

Dalam kesimpulan dari hasil pembahasan kami sebagai penulis dalam hal tersebut maka Dalam mengembangkan Ekonomi Ummat dalam Upaya Penguatan Moderasi Beragama yang dilakukan oleh Kanwil Kementrian Agama Provinsi Sumatera Utara dapat di wujudkan melalui program kegiatan yang telah disusun dalam Sasaran Kegiatan dalam Renstra Tahun 2020-2024 yang diantaranya adalah :

- a. Meningkatkan konservasi dan optimalisasi produk budaya dan religi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b. Meningkatnya rasa hormat terhadap keragaman budaya, sebagai wujud implementasi nilai-nilai agama.
- c. Peningkatan pembangunan sosial untuk mendukung pelayanan keagamaan yang lebih baik lagi.

Bukan dari sektor itu saja namun juga dalam persoalan kepegawaian ataupun kinerja dan bagi para pegawai agar dapat selalu menikmati pekerjaannya serta menjalin kerukunan antar sesama pegawai maupun pimpinan demi suatu terjalannya suasana kerja yang tenang sehingga supaya terhindar dari yang namanya persoalan permasalahan yang ada di lingkungan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina et al. 2022. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6(1): 974–80.
- Aini, Rija, dan Sri Sudiarti. 2022. "Impelementasi Disiplin Kerja Dan Produktivitas Kerja Perspektif Ekonomi Islam." *Inovatif: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital dan Kewirausahaan* 1(2): 174–86.
- Apriani, Ni Wayan, dan Ni Komang Aryani. 2022. *12 Kalangwan Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa dan Sastra Moderasi Beragama*.
- Cantika, Bella, dan Azhari Akmal Tarigan. 2022. "Pengembangan Ekonomi Umat Terhadap Penguatan Moderasi Beragama Pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara." *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(2): 1233–42.
- Damanik, Surya Ningsih. 2022. "Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Bidang Pendidikan Madrasah Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara." *VISA: Journal of Vision and Ideas* 3(1): 89–96.
- Ekonomi, Penguatan, Umat Melalui, dan Lembaga Keagamaan. 2011. "PENGUATAN EKONOMI UMAT MELALUI LEMBAGA KEAGAMAAN Moch . Khoirul Anwar Ekonomi Syari ' ah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya . الـبـحـث Prolog Islam adalah agama yang universal . Ajaran-ajarannya mengatur dan membimbing semua aspek kehidupan manusia." 01(01): 89–102.
- Faisal, Haitomi et al. 2022. "Religious Moderation in the Perspective of Indonesian Ministry of Religious Affairs: Concept and Implementation." *Journal of Religious Moderation* 1(1): 66–83.
- Muhammad, Mahmudah Mulia. 2022. "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Kearifan Lokal." *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3(2): 119–27.
- Nasution, IS, & Khair, H. (2022). Pengaruh pengawasan dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai melalui Organization Citizenship Behavior pada kantor wilayah kementerian agama Provinsi Sumatera Utara. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)* , 5 (2), 1456-1469.

- Qodari, Amimah, Fachruzzaman Fachruzzaman, dan Isma Coryanata. 2021. "Pengaruh Motivasi, Tunjangan Kinerja Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Tingkat Kecurangan Pegawai." *Jurnal Fairness* 8(1): 65–88.
- Simatupang, Sudung, Pawan Darasa Panjaitan, Eliza Arshandy, dan Hendrick Sasimtan Putra. 2023. "Integritas Dan Budaya Organisasi Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 6(2): 270–78.
- Sinaga, M. Hendri Sugara et al. 2022. "Peran Kementrian Agama dalam Moderasi Beragama." *Jurnal Al-Qiyam* 3(1): 21–25.